

ABSTRAK

Hasanah Jam'ul, 2016. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan pada pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pembimbing : JOHAN MALIGAN, SH.,MH

Kata kunci : Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan untuk memenuhi standar kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan Peraturan menteri kesehatan nomor 46 tahun 2013 tentang registrasi tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan terkandung dua aspek yaitu aspek filosofi dan aspek yuridis. aspek filosofi yaitu untuk melindungi kepentingan umum dalam hal kepuasan dan terpenuhinya hak – hak pasien atau masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima. aspek yuridis yaitu adanya kepastian hukum untuk para tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dimana sesuai dengan undang – undang tersebut merupakan suatu pelayanan yang harus oleh tenaga kesehatan menajamin dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan pada pelayanan Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat belum berjalan baik sehingga belum terwujudnya pelayanan prima yang sangat diharapkan oleh masyarakat sehingga tingkat kepuasan di bidang kesehatan terus meningkat.

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan untuk mencapai komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) dengan tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV-AIDS, TB dan malaria serta penyakit lainnya dan yang tidak terkait langsung yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan serta mendorong diarahkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan tersebut dibutuhkan adanya ketersediaan data dan informasi yang akurat bagi proses pengambilan keputusan dan perencanaan program. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang evidence based diarahkan untuk penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Untuk itu dinas kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) berusaha agar tingkat Kesehatan masyarakat meningkat. Sehingga hasil pembangunan kesehatan yang memuat data derajat kesehatan, sumber daya kesehatan dan capaian indikator hasil pembangunan kesehatan untuk dipakai sebagai alat tolok ukur kemajuan pembangunan kesehatan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi program-program kesehatan di Propinsi Nusa Tenggara Barat.